

## RINGKASAN HASIL LOKAKARYA RENCANA STRATEGIS KONSIL LSM INDONESIA (Periode Maret 2014 - Februari 2018)

### Latar Belakang

---

Memasuki usia 4 tahun, Konsil LSM Indonesia perlu meninjau kembali posisi dan perannya agar senantiasa relevan dengan perubahan situasi lingkungan eksternal dan pengaruhnya terhadap kondisi internal organisasi. Perubahan ini perlu dikaji dan disikapi secara kritis dalam rangka membangun orientasi dan strategi gerakan sesuai misi yang dibawa saat kelahirannya, visi yang ingin diperjuangkan dan diwujudkan serta nilai-nilai yang ingin diinternalisasikan.

Setidaknya ada dua unsur pokok yang terkandung dalam visi Konsil yakni **LSM yang sehat dan kuat**, yakni **pertama**, LSM yang hidup dalam lingkungan politik dan hukum yang bebas dan demokratis, **kedua**, LSM yang mampu mempraktikkan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas; demi meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.

Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, tiga tahun lalu, telah diformulasikan peran-peran utama akan yang dijalankan Konsil, yakni: **(1)** membela dan memperjuangkan nilai-nilai, tujuan dan kepentingan LSM pada umumnya serta LSM anggota pada khususnya; **(2)** melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi LSM yang sehat dan kuat; **(3)** meningkatkan kapasitas untuk memperkuat akuntabilitas anggota; **(4)** mempromosikan gagasan dan penerapan kode etik LSM kepada komunitas LSM Indonesia, terutama anggota; **(5)** mengembangkan kerjasama dengan pihak luar dan di antara anggota, serta membantu pengembangan program serta aktivitas anggota.

Setelah tiga tahun berlalu, situasi ekonomi, hukum dan sosio-politik nasional dan global berubah dengan cepat yang berimplikasi terhadap kondisi internal dan gerakan LSM. Menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dan dampaknya terhadap gerakan dan kondisi internal LSM, terutama anggota Konsil, tersebut maka diperlukan perencanaan strategis.

Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan, serta menyusun prioritas tindakan dan kebijakan organisasi. Penyusunan rencana strategis secara partisipatif diharapkan dapat menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan oleh Konsil LSM Indonesia, setidaknya untuk tiga sampai lima tahun mendatang. Selain itu kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi agar semua komponen dan personil dalam struktur kepengurusan yang baru terpilih dalam Kongres ke II pada September 2013 lalu, lebih mengenal dan menginternalisasi visi, misi dan nilai organisasi.

Sebelumnya, Konsil LSM Indonesia sudah menggelar Lokakarya untuk merumuskan Renstra periode Maret 2011 - Februari 2014. Dan Lokakarya ini diharapkan akan merumuskan Renstra Konsil periode Maret 2014 - Februari 2018. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah Komite Pengarah Nasional (KPN), Dewan Etik, Perwakilan Konsil Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sekretariat Nasional serta perwakilan anggota

### Tujuan Lokakarya

1. Mereview capaian Renstra Maret 2011- Februari 2014.
2. Menganalisis lingkungan eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi Konsil LSM Indonesia
3. Merumuskan acuan program strategis periode 2014 – 2018, baik tujuan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.
4. Merumuskan Workplan – Rencana Kerja Konsil LSM Indonesia untuk periode 2014 – 2018.

5. Merumuskan Financial Plan – Rencana Keuangan Konsil LSM Indoonesia dalam rangka menunjang program strategis yang telah dirumuskan.

**Output Lokakarya**

1. Rumusan hasil capaian Renstra Maret 2011- Februari 2014
2. Adanya hasil analisis internal dan kecenderungan eksternal
3. Adanyarumusan isu-isu strategis
4. Adanya rumusan LogicalFrameworkAnalysis (LFA) untuk jangka waktu 5 tahun (Maret 2014- Februari 2018).
5. Adanya Workplan, minimal 3 tahun (2014 – 2016)
6. Adanya rumusan perencanaan keuangan Konsil LSM Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun (2014 – 2018)

## **Fasilitator**

Fasilitator adalah Bapak Meth Kusumahadidari SATUNAMA Yogyakarta.

## **Peserta**

Peserta Lokakarya berjumlah 24 orang yang terdiri dari Komite Pengarah Nasional (9 orang), Dewan Etik (3 orang), Sekretariat Nasional (5 orang), 3 orang dari masing-masing Perwakilan Konsil LSM (Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan) dan 4 orang perwakilan anggota dari provinsi yang tidak memiliki perwakilan di Komite Pengarah Nasional dan Dewan Etik.

## **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Lokakarya berlangsung pada 25 –28 Februari 2014 di Agape Resort, Gadog, Bogor.

## **Ringkasan Alur dan Hasil Lokakarya**

Secara garis besar alur pokok-pokok pembahasan dan hasil dalam perumusan rencana strategis ini adalah :

### **1. Analisa Internal dan Eksternal untuk Pemetaan Fakta-fakta.**

Ada 5 jenis analisa yang digunakan yakni : (a) analisa hasil kerja masa lalu, (b) analisa identitas anggota, (c) analisa SAOER, (d) analisa kecenderungan, (e) analisa institusi. Pembahasan masing-masing analisa dilakukan dalam kelompok dan dilanjutkan dengan diskusi pleno. Berikut sejumlah rekomendasi tindakan strategis dari 5 jenis analisa yang dihasilkan dalam diskusi pleno.

#### **A. Rekomendasi Tindakan Strategis Hasil Analisis Kerja Masa Lalu:**

- Internalisasi Kode Etik lebih ditingkatkan
- Memperluas jaringan dan akses dengan berbagai sumberdaya dalam negeri
- Meningkatkan pendekatan kepada legislatif, eksekutif, dan swasta.
- Meningkatkan pendekatan dan kerjasama dengan media massa.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi teruji dalam pengembangan instrumen Kode Etik.
- Lebih menampakkan relasi/ posisi LSM dengan rakyat.

#### **B. Rekomendasi Hasil Analisis Identitas Anggota :**

- Mendorong organisasi untuk melakukan evaluasi visi misi secara periodik.
- Menegakkan kode etik secara lebih ketat
- Memperkuat keswadayaan masyarakat dampingan.
- Membangun kerjasama dengan kelompok masyarakat dampingan untuk berkontribusi dalam perluasan program.
- Mengembangkan strategi passing out yg tepat.
- Melakukan penyegaran tentang isu akuntabilitas.
- Mengembangkan alternatif pendanaan yang cocok dengan kultur LSM.
- Mendorong pengembangan divisi bisnis LSM yang ditangani secara khusus.
- Mendorong peningkatan kapasitas kritis LSM agar lebih "visioner" strategis.
- Membangun kesadaran tentang pentingnya regenerasi organisasi.
- Mengembangkan knowledge management di organisasi.
- Melibatkan anggota dalam kegiatan jaringan (Konsil).
- Meningkatkan variasi kegiatan/ program yang sesuai dengan kebutuhan anggota.
- Lebih terbuka dan menyesuaikan diri dengan berbagai mitra, misalnya pemerintah dan swasta.
- Meningkatkan kemampuan manajemen.
- Membantu perbaikan disorientasi/ orientasi organisasi anggota.

### **C. Rekomendasi Hasil Analisis SAOER**

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang berbasis HAM bagi LSM anggota, masyarakat, dan pemerintah
- Meningkatkan komunikasi dan informasi untuk mengkampanyekan keunggulan produk dalam negeri
- Membangun media yang ramah
- Kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi informasi dalam negeri
- Pengetahuan dan keterampilan terkait gender dan inklusif
- Kebijakan pro kesetaraan dan keadilan gender
- Keterampilan advokasi
- Kerampilan menggunakan media untuk kampanye
- Peningkatan sumber daya dan sumber dana dari sumber dalam negeri dari pemerintah, swasta dan masyarakat

### **D. Rekomendasi Hasil Analisis Kecenderungan**

- Penguatan fungsi fasilitasi oleh Konsil LSM terhadap anggota-anggotanya untuk memperkuat sumber daya (informasi, tenaga ahli, dan akses pendanaan)
- Penegakan Kode Etik terhadap anggota
- Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah yang selaras dengan Kode Etik Konsil LSM untuk penguatan sumber daya anggota
- Penguatan struktur organisasi melalui penambahan anggota dan penguatan perwakilan
- Pembentukan perwakilan Konsil di Propinsi yang telah memenuhi syarat untuk mempermudah pengambilan keputusan
- Perwakilan propinsi yang sudah ada di Sumsel (Majelis LSM) bisa kembali berfungsi efektif
- Tersusun SOP yang mengatur tentang mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan antar badan di dalam Konsil LSM
- Media Komunikasi Konsil makin kuat dalam isi/muatan informasi dan banyak menjadi rujukan
- Ada SOP Keuangan yang selalu disempurnakan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas
- Ada kerjasama yang lebih jangka panjang dengan lembaga donor untuk pendanaan organisasi
- Penguatan kapasitas anggota dalam pengelolaan keuangan
- Hasil renstra dapat diturunkan menjadi program kerja yang implementatif dan melibatkan anggota
- Ada diversifikasi sumber pendanaan
- Terbentuk jaringan-jaringan baru di tingkat nasional dan diwilayah perwakilan Konsil LSM
- Jaringan lain (di luar Konsil) juga membahas isu-isu Konsil LSM termasuk media massa yang mendukung isu Konsil LSM

### **E. Rekomendasi Hasil Analisa Institusi**

- Perlu merumuskan penjabaran AD/ ART secara detail yang mengatur kewenangan KPN dan Dewan Etik.
- Perlu merumuskan mekanisme pengambilan keputusan KPN secara virtual terkait hal-hal yang bersifat insidental.
- Perlunya memaksimalkan layanan informasi yang terkait dengan sumber daya : donor, beasiswa, dsb bagi anggota konsil.
- Perlunya memaksimalkan fungsi perwakilan dan menambah jumlah perwakilan
- Perlunya merumuskan pembagian tugas dan tanggungjawab anggota KPN.
- Memaksimalkan manajemen distribusi pengetahuan bagi staf.
- Mendokumentasikan dan sharing lesson learned antar anggota di setiap provinsi
- Memaksimalkan fungsi setiap perwakilan Konsil

## 2. Isu Strategis Organisasi, Manajemen, Keuangan, Jaringan dan Advokasi

Berdasarkan sejumlah rekomendasi tindakan strategis diatas, dilakukan seleksi dan kategorisasi ke dalam 6 komponen yakni :organisasi, manajemen, program, jaringan dan advokasi.

Organisasi	Manajemen	Program	Keuangan	Jaringan	Advokasi
<p><b>Isu strategis 1:</b> Memperkuat spirit dan komitmen elemen-elemen institusi sebagai gerakan rakyat.</p> <p>Isu strategis 7: Memperkuat komitmen dan praktek akuntabilitas pada elemen-elemen institusi Konsil</p>	<p><b>Isu strategis 2:</b> Manajemen yang akuntabel, produktif, vokasional, efektif, dan efisien.</p>	<p>Isu strategis 3: Program yang meningkatkan kepuasan dan kepercayaan anggota dan masyarakat.</p>	<p>Isu strategis 4: Meningkatnya kapasitas sumber daya OMS.</p>	<p>Isu strategis 5: Menguatnya solidaritas OMS lokal, nasional, dan internasional.</p>	<p>Isu strategis 6: Adanya kebijakan publik yang memperkuat gerakan OMS.</p>

### 3. Arah Organisasi (Visi,Misi, dan Prinsip)

<b>Visi &amp; Misi</b>	
<p>VISI:</p> <p>Terwujudnya kehidupan masyarakat sipil yang sehat, kuat/berdaya dan inovatif, yang hidup di dalam lingkungan politik dan hukum yang demokratis</p>	
<p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat spirit, komitmen dan kapasitas LSM untuk mempraktikkan prinsip, tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang baik sebagai upaya memperkuat gerakan rakyat</li> <li>2. Mendorong solidaritas organisasi masyarakat sipil dalam proses perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat sipil yang sehat dan kuat</li> <li>3. Memperkuat upaya-upaya advokasi kebijakan publik untuk mewujudkan hak-hak sipil dan hak-hak social politik bagi tumbuh dan berkembangnya LSM yang sehat dan akuntabel</li> </ol>	
<p>Prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anti Diskriminasi</li> <li>2. Kerelawanan</li> <li>3. Anti Korupsi, kolusidan nepotisme</li> <li>4. Transparandan akuntabel</li> <li>5. Partisipatif</li> <li>6. Independen</li> <li>7. Anti Kekerasan</li> <li>8. Adildan Setara Gender</li> </ol>	

### 4. Bidang Hasil Pokok, Bidang Kegiatan Utama, Program Utama dan Tagline

Bidang Hasil Pokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsil LSM menjadi rujukan OMS</li> <li>2. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap OMS</li> <li>3. Menguatnya posisi tawar OMS</li> <li>4. Adanya kebijakan publik yang mendukung OMS</li> <li>5. Meningkatnya solidaritas masyarakat sipil</li> </ol>
Bidang Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel</li> <li>2. Kampanye akuntabilitas OMS</li> <li>3. Mengembangkan forum-forum kemitraan dan solidaritas</li> <li>4. Menguatnya kerja sama multi stakeholders</li> <li>5. Mengeluarkan Laporan Alternatif tentang penegakan dan pemenuhan HAM/ Mengekspresikan keberpihakan kepada HAM</li> <li>6. Advokasi kebijakan public</li> <li>7. Meningkatkan Kapasitas anggota</li> <li>8. Pengembangan dokumentasi, informasi, komunikasi dan edukasi</li> </ol>
Core Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi kebijakan publik</li> <li>2. Penguatan kapasitas anggota</li> <li>3. Konsolidasi OMS</li> <li>4. Penggalan sumber daya mandiri</li> </ol>

Tagline	Berorganisasi adalah Hak, Akuntabilitas adalah Kewajiban
---------	--

## 5. Matrik Perencanaan Program (MPP) Tahun 2014-2018

	INDIKATOR	ASUMSI	RESIKO
<b>Goal</b>			
1. Adanya kebijakan publik yang mendukung OMS	1.1 UU CSR yang memastikan kepentingan OMS bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 1.2 UU yang mengatur alokasi dana APBN/ APBD untuk OMS secara transparan dan akuntabel 1.3 Peraturan hukum lainnya yang mengatur syarat transparansi dan akuntabilitas bagi OMS penerima dana APBN/ APBD		
2. Meningkatnya solidaritas masyarakat sipil pada tingkat nasional	2.1 Wadah OMS yang mampu secara bermartabat melakukan negosiasi dengan negara dan pasar yang memiliki program yang dijalankan secara akuntabel dan efisien (diperjelas dalam mid-term evaluasi). 2.2 Wadah OMS dimulai paling lambat Januari 2017.		
<b>Purpose</b>			
1. Menguatnya posisi tawar OMS	1.1 Ada minimal 5 perusahaan yang bekerja sama dengan Konsil dengan menggunakan PP No 93/2010 atau peraturan lain yang relevan.	A.1 Sebagian sektor swasta ( antara lain anggota Global Compact) bersedia untuk bersinergi dengan OMS mendukung UU CSR/ TSP.	R.1 Adanya penolakan dari elemen-elemen legislatif, eksekutif, dan perusahaan di berbagai tingkatan terhadap RUU CSR.
	1.2 Ada kebijakan di tingkat daerah (Perda, Pergub, perbub/perwali) yang mengakomodir kepentingan Masy sipil untuk mengakses dana CSR	A.2 Banyaknya dukungan OMS untuk memperjuangkan UU CSR/ TSP dan APBN/ APBD.	R.2 Ada elemen-elemen OMS yang tidak sepatutnya dengan bekerja sama dengan pemerintah dan swasta.
	1.3 Minimal ada 5 wilayah pemda (Sulsel, Sultra, Sumut, Bojonegoro, dan Sumbar) dengan regulasi yang mengatur kriteria dan mekanisme akses yang transparan dan akuntabel terhadap dana APBD.	A.3 Adanya institusi-institusi pemerintah pusat mau pun daerah yang mendukung kemitraan dengan LSM.	R.3 Adanya upaya-upaya dari <i>pseudo</i> LSM yang menghambat perjuangan-perjuangan penguatan masyarakat sipil.
2. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap OMS	2.1 Minimal 5 wilayah pemda (alternative Sulsel, Sultra, Sumut, Bojonegoro, dan Sumbar) memiliki Forum Koordinasi OMS, sektor swasta	A.4 Adanya perangkan media sosial yang dapat memobilisasi dukungan publik untuk isu akuntabilitas dan keberhasilan advokasi	

	dan pemerintah.	UU CSR/ TSP dan alokasi dana APBN / APBD.	
	2.2 Bertambahnya jumlah LSM yang memperjuangkan keadilan publik dan mendapat pengakuan masyarakat di tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional.	A.6 Adanya dukungan organisasi internasional terhadap perusahaan-perusahaan dari negaranya agar mendukung kerja sama dengan OMS Indonesia	
	2.3 Meningkatnya jumlah sumbangan publik kepada LSM yang citizen inovator dan social entrepreneurship dan meningkatnya jumlah sukarelawan masyarakat yang membantu program LSM-LSM dari tahun ke tahun.		
3. Menguatnya solidaritas multi sektor OMS.	3.1 Kerja sama strategis berbagai jenis OMS, minimal 5 jenis asosiasi: antara lain Asosiasi Keagamaan, Asosiasi Organisasi Perempuan, Lingkungan, sektor ekonomi, dll.		
	3.2 Ada kesepakatan bersama membangun aliansi strategis untuk merespon isu-isu strategis nasional.		
4. Terbangunnya solidaritas internasional yang lebih kuat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktif berpartisipasi sebagai anggota CIVICUS, Open Forum for CSO development effectiveness, dan GRI.</li> <li>- Minimal ada 8 kerja sama dengan lembaga internasional dan regional mis. DOLGOSEA.</li> <li>-Terintegrasinya aspirasi citizen inovator dalam UU CSR.</li> <li>- Agenda strategis OMS Indonesia/ Konsil yang update-aktual menjadi pembahasan asosiasi internasional.</li> </ul>		
<b>Outputs</b>			
1. Konsil LSM menjadi rujukan berbagai jenis OMS Indonesia dalam perspektif akuntabilitas	<p>1.1. Sebaran anggota Konsil berasal dari minimal 50 % jumlah propinsi dicapai dalam periode 3 tahun pertama.</p> <p>1.2.Meningkatnya jumlah anggota minimum 10% per tahun, setiap tahun sampai dengan 2018.1.3. Cara kerja manajemen Konsil harus berstandar internasional dengan ciri-ciri :</p>	<p>A.1 Administrasi pemerintah baru hasil pemilu 2014 masih berjalan pada koridor demokratis mendukung penguatan OMS.</p> <p>A.2 Media mainstream dikuasai industri politisi yang mendukung upaya-upaya akuntabilitas pelayanan publik.</p>	<p>R.1. Resistensi OMS terhadap isu akuntabilitas, persaingan/ego antar jaringan yang tinggi di lingkungan OMS.</p> <p>R.2. Masih kuatnya pandangan militer dan kelompok-kelompok garis keras bahwa OMS adalah musuh/ kaki tangan barat</p> <p>R.3. Batalnya dukungan</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsil di audit secara berkala oleh Akuntan Publik</li> <li>- Menerbitkan annual report secara berkala</li> <li>- Menjalankan Kode Etik internal</li> <li>- Menggunakan sumber daya/ fasilitas yang ramah lingkungan</li> <li>- Konsil mengeluarkan surat dukungan/ rekomendasi untuk proposal anggota jika dibutuhkan.</li> <li>- Literatur yang diterbitkan berkualitas dan menjadi referensi mengenai akuntabilitas</li> </ul>	<p>A.3 Berbagai jenis OMS mendukung promosi dan penguatan akuntabilitas dan transparansi semua institusi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap OMS secara umum.</p> <p>A.4 Masih ada banyak lembaga internasional yang tertarik dengan penguatan masyarakat sipil dan OMS</p> <p>A.5 Meningkatnya solidaritas masyarakat untuk membantu program-program kemanusiaan.</p>	<p>dari lembaga mitra yang sudah memberikan komitmen.</p> <p>R.4. Adanya kooptasi dana CSR oleh pemerintah daerah sehingga berkurangnya alokasi untuk OMS.</p>
2. Adanya sistem kampanye akuntabilitas OMS.	<p>2.1. Adanya konsep strategi kampanye akuntabilitas</p> <p>2.2. Adanya jenis dan jumlah instrumen komunikasi yang up to date.</p> <p>2.3. Adanya upaya review dan updating media komunikasi</p>		
3. Adanya forum-forum kemitraan yang solid dan efektif	3.1. Jumlah anggota forum meningkat dari tahun ke tahun		
	3.2. Makin banyak LSM yang menggunakan standar akuntabilitas Konsil dan kualitas akuntabilitasnya semakin meningkat.		
	3.3. Adanya minimal 10 program bersama multi stakeholders selama 5 tahun		
	3.4. Terbangunnya basis forum multi stakeholders yang akan dikembangkan tahun ke 3		
4. Adanya upaya-upaya inovatif keberpihakan kepada prinsip-prinsip HAM	4.1. Ada laporan akuntabilitas dalam penegakan HAM di Indonesia.		
	4.2. Adanya analisis terhadap dokumentasi dan laporan HAM yang dibuat oleh organisasi HAM.		
5. Sistem advokasi kebijakan public yang efektif.	5.1 Ada grand design strategi advokasi yang mendasarkan pada analisis kebijakan yang terkait dengan sumber daya OMS.		
	5.2. Adanya naskah akademik draft RUU CSR evident base yang dikumpulkan dari berbagai jenis sumber pengetahuan yang dirintis dari bawah.		

	5.3. Adanya minimal 5 naskah akademik Raperda CSR/TSP/pendanaan untuk OMS di Makassar. Alternatif wilayah: Sulsel, Sultra, Sumut, Bojonegoro, dan Sumbar		
	5.4 Secara periodik dilakukan review atas implementasi dan pengelolaan CSR dan hikmahnya disebarikan ke semua jaringan.		
	5.5 Adanya aliansi strategis untuk advokasi Raperda CSR/TSP/pendanaan untuk OMS		
6. Meningkatnya kapasitas organisasi anggota Konsil.	6.1. Minimal 5 perusahaan bekerja sama menggunakan PP No 93/ 2010 (penerima dana perusahaan - 5% pajak perusahaan- untuk bidang kebencanaan, seni, olahraga, infrastruktur pendidikan), atau peraturan lainnya di tingkat propinsi		
	6.2. Minimal 50 % jumlah anggota Konsil memiliki minimal 3 sumber pendanaan		
	6.3. Semua anggota Konsil melakukan advokasi kasus-kasus yang merugikan publik di level desa s.d nasional.		
7. Manajemen Konsil vokasional, akuntabel, efektif, dan efisien.	7.1. Adanya SOP pendokumentasian, informasi, komunikasi dan edukasi kepada seluruh anggota.		
	7.2. Adanya berbagai SOP/mechanisme kerja pelaksanaan organisasi supaya organisasi berjalan lancar, efektif dan efisien.		
	7.3. Adanya draft revisi AD/ART yang sudah disempurnakan.		
	7.4. Adanya minimal 5 sumber pendanaan dan meningkatnya tabungan Konsil minimal 10% dari tahun ke tahun.		
	7.6. Terlaksananya audit keuangan oleh akuntan publik secara periodik		
	7.7. Adanya pengembangan staf sekretariat Konsil minimal 2 kali setahun sesuai kebutuhan		



2.5. Diskusi Konsil di TV nasional (ex: diskusi Sugeng Suryadi Syndicate atau acara Sentilan Sentilun)	2.5.1. Profil dari Konsil dan ide-ide besarnya makin dikenal oleh masyarakat									
<b>Output 3. Adanya forum-forum kemitraan yang solid dan efektif</b>										
3.1. Melakukan promosi forum	Jumlah anggota forum meningkat dari tahun ke tahun		√		Manajer Publikasi	√	√	√	√	√
3.2. Kerjasama dengan media untuk diseminasi isu akuntabilitas LSM	Diterbitkannya tulisan/ artikel tentang isu akuntabilitas LSM di media secara regular		√		Manajer Publikasi	√	√	√	√	√
3.3. Rangkaian identifikasi, FGD & Workshop untuk Forum Multistakeholders	Lahirnya embrio forum multi stakeholders mengatasi masalah strategis bangsa pada berbagai tingkatan		√		Manajer Advokasi	√	√	√	√	
3.4. Diskusi publik tentang akuntabilitas OMS, bisnis, parpol, media dan pemerintah			√		Manajer Advokasi		√	√	√	√
3.5. Review parsipatoris tentang internalisasi nilai-nilai akuntabilitas OMS, bisnis, parpol, media dan	Diterapkannya standar akuntabilitas dalam berbagai bidang bisnis dan pemerintahan		√		Manajer Advokasi			√	√	√
3.6. Adanya program yang diinisiasi bersama pemerintah, media, swasta, dan LSM non anggota Konsil untuk mendukung kemitraan.	Terjadinya minimal 2 program bersama multi stakeholders setiap tahun		√		Direktur Eksekutif			√	√	√
<b>Output 4 Adanya upaya-upaya inovatif keberpihakan kepada prinsip-prinsip HAM</b>										
4.1. Kajian dan diskusi tentang akuntabilitas dalam penegakan HAM di Indonesia	Ada laporan akuntabilitas dalam penegakan HAM di Indonesia		√		Manajer Advokasi			√	√	√
4.1.1. Penyusunan Laporan			√		Manajer Advokasi			√	√	√

4.1.2. Diseminasi laporan akuntabilitas dalam penegakan HAM; sebagai bagian dari proses advokasi ; DPR, pemerintah dan media	Adanya respon positif dari pemerintah untuk lebih akuntabel dalam penegakan dan pemenuhan HAM			√	Manajer Advokasi			√	√	√
4.2. Melakukan review terhadap dokumentasi dan laporan HAM yang dibuat organisasi HAM	Adanya hasil analisis atas laporan HAM yang dibuat oleh organisasi HAM.			□	Manajer Advokasi			√	√	√
<b>Output 5. Sistem advokasi kebijakan public yang efektif</b>										
Pembuatan grand design system advokasi	Ada grand design strategi advokasi yang mendasarkan pada analisis kebijakan yang terkait dengan sumber daya OMS.			□	Manajer Advokasi	□		□		□
Melakukan advokasi (kajian, kampanye public, audiensi ) RUU TSP	5.2.Adanya naskah akademik draft RUU TSP evident base yang dikumpulkan dari berbagai jenis sumber			□	Manajer Advokasi	□	□	□	□	□
Melakukan advokasi (kajian, kampanye public, audiensi ) Raperda TSP di Makassar, Sultra, Sumut, Bojonegoro, dan Sumbar	Adanya minimal 5 naskah akademik Raperda CSR/TSP/ pendanaan untuk OMS di Makassar, Sultra, Sumut, Bojonegoro, dan Sumbar			□	Manajer Advokasi	□	□	□	□	□
Melakukan audit social secara regulasi mengenai implementasi dan pengelolaan TSP	Secara periodik dilakukan review atas implementasi dan pengelolaan TSP dan hikmahnya disebarkan ke semua jaringan.			□	Manajer Advokasi		□		□	
Adanya forum multipihak daerah untuk advokasi Raperda CSR/TSP/pendanaan untuk OMS	Adanya aliansi strategis untuk advokasi Raperda CSR/TSP/pendanaan untuk OMS			□	Direktur eksekutif	□				
<b>Output 6. Meningkatnya kapasitas organisasi anggota Konsil.</b>										
Menjalin komunikasi dengan key person untuk membangun kerjasama strategis	6.1. Minimal 5 perusahaan bekerja sama menggunakan PP No 93/ 2010 (penerima dana perusahaan - 5% pajak perusahaan- untuk bidang kebencanaan, seni, olahraga, infrastruktur pendidikan), dan			□	Direktur eksekutif	□				

	peraturan lainnya di tingkat propinsi								
peningkatan kapasitas dengan melakukan kerjasama OMS dengan perusahaan	wawasan, sikap, skill , problem solving untuk pengembangan institusi makin sehat	□			Direktur eksekutif	□			
Pendampingan fundrising	6.2. Minimal 50 % jumlah anggota Konsil memiliki minimal 3 sumber pendanaan	□			Direktur eksekutif	□			
Pelatihan Advokasi untuk Anggota Konsil	6.3. Semua anggota Konsil melakukan advokasi kasus-kasus yang merugikan publik di level desa s.d nasional.	□			Manajer Advokasi	□			
penerapan standar dasar akuntabilitas	meningkatnya penerapan kode etik di lembaga anggota	□			Direktur Eksekutif	□			
<b>OUTPUT 7. Manajemen Konsil vokasional, akuntabel, efektif, dan efisien</b>									
1.1. Sekretariat menyusun draft SOP KIE					Manajer Publikasi & informasi				
1.2. Sharing draft SOP KIE kepada anggota untuk mendapatkan masukan	Adanya SOP KIE	□				□			
1.3. Pengesahan SOP KIE oleh sekretariat									
2.1. Menyusun/ menyempurnakan SOP:	Adanya berbagai SOP/mekanisme kerja pelaksanaan organisasi supaya organisasi berjalan lancar, efektif dan efisien.								
a. SOP keuangan		□			Manajer keuangan	□			
b. SOP kesekretariatan					Manajer Kantor				
c. SOP hubungan sekretariat nasional dengan perwakilan					Perwakilan				

d. SOP Mekanisme Kerja dan pengambilan keputusan KPN				KPN					
e. SOP Mekanisme Kerja dan pengambilan keputusan Dewan etik				Dewan Etik					
2.2. Sharing draft SOP kepada KPN, Dewan Etik, dan perwakilan Konsil untuk mendapatkan masukan				Manajer kantor					
2.3. Kompilasi masukan untuk SOP				Manajer Kantor					
2.4. Sharing revisi SOP				Manajer kantor					
2.5. Pengesahan SOP				KPN					
3. Menyusun draft revisi AD/ART	Adanya draft revisi AD/ART yang sudah disempurnakan.			KPN					
4.1. Penyusunan proposal Kepada Donor, sektor swasta	1. Minimal 5 MOU kerjasama program konsil dengan lembaga donor dan perusahaan			Direktur & Finance					
4.2 Mengirimkan dan loby ke donor potensial dan sektor swasta				Direktur					
4.3 Pengumpulan dana saving/ tabungan dari iuran anggota, kontribusi staf, penjualan jurnal, merchandise, dan sewa	2. Tabungan konsil LSM meningkat minimal 10% dari tahun ke tahun			Finance					
5. Audit keuangan dari akuntan publik	Tersedianya dokumen audit keuangan tahunan konsil			Direktur, Finance					
6. Melakukan capacity building (Pelatihan dan magang )	Meningkatnya kapasitas staf			Direktur					